

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh variabel PDB, Suku Bunga BI, inflasi, pertambahan jumlah wajib pajak, jumlah angkatan kerja, PMDN, dan PMA terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia dalam kurun waktu 2009-2018. Pengumpulan data dilakukan melalui kumpulan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) baik melalui web maupun dari buku terbitan Kementerian Keuangan dan BPS. Penelitian dilakukan dengan data sekunder dan dengan menggunakan data time series yaitu dengan mengolah data tahunan yang kemudian diubah menjadi data kuartalan dengan metode Interpolasi Linier menjadi sebanyak 40 sampel.

B. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data *time series* per tahun selama kurun waktu tahun 2009-2018. Data sekunder adalah data yang telah tersedia dari berbagai sumber. Data tersebut berupa catatan dan dokumentasi terkait. Data yang diperoleh dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, diantaranya data dari Badan Pusat Statistik Nasional RI, baik melalui web maupun dari buku referensi data milik BPS. Data yang akan diteliti mencakup data Realisasi PDB, Suku Bunga BI, Inflasi, Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Orang Bekerja,

Realisasi PMDN dan Realisasi PMA di Indonesia selama sepuluh tahun yaitu dari Tahun 2009-2018.

C. Teknik Pengambilan Sampel

Data penelitian didapat dari data relevan dan didapatkan data untuk setiap tahun selama sepuluh tahun yaitu Tahun 2009-2018. Data PDB, Inflasi, Pertambahan Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Orang Bekerja, PMDN, PMA, dan Penerimaan PPh Pasal 21 bentuk tahunan diubah menjadi data kuartalan dengan metode interpolasi linier. Setelah dilakukan Metode Interpolasi Linier kemudia didapatkan data sejumlah 40 sampel yang terdiri dari empat data kuartal dalam setiap variabel penelitian yang berjumlah 7 variabel .

D. Teknik Pengumpulan Data

Data-data diperoleh dari Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik, jurnal-jurnal, hasil penelitian, dan sumber bacaan lainnya yang relevan dengan variabel-variabel yang digunakan untuk keperluan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan oleh sumber.

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Indonsia

Pada Periode Tahun 2009-2018” adalah dengan Variabel Independen PDB, Suku Bunga BI, Inflasi, Pertambahan Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Orang Bekerja, PMDN, dan PMA dan variabel dependen yaitu penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Definisi variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada priode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. PDB hanya menghitung totl produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memkai faktor produksi dalam negeri atau tidak.

Produk Domestik Bruto dapat dihitung dengan dua metode pendekatan yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Rumus Produk Domestik dengan pendekatan pengeluaran adalah (Mankiw, 2014):

$$\text{PDB} = \text{konsumsi} + \text{investasi} + \text{pengeluaran pemerintah} + (\text{ekspor} - \text{impor})$$

2. Suku Bunga BI

Suku Bunga BI adalah adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik yang dinyatakan

dalam persentase. Persentasi Suku Bunga BI dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah nilai tukar Rupiah terhadap Dolar pada waktu tertentu (Sumidartini, 2017).

3. Inflasi

Inflasi adalah perubahan harga yang meningkat yang diukur berdasarkan indeks harga di Indonesia, yang dihitung perbulan dalam satuan persen. Inflasi dalam penelitian ini menggunakan data Inflasi yang terjadi di Indonesia selama sepuluh tahun dan dilakukan perhitungan menjadi data kuartal setiap tahun. Satuan dari inflasi adalah persen (Rachman, 2014).

4. Pertambahan Jumlah Wajib Pajak

Pertambahan Jumlah Wajib Pajak adalah pertambahan jumlah total dari orang pribadi maupun badan yang menurut ketentuan peraturan perpajakan, ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, yang diukur dalam satuan wajib pajak. Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah dari seluruh wajib pajak yang ada di Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun (Tandiling, 2013).

5. Jumlah Orang Bekerja

Jumlah Orang Bekerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja atau yang mempunyai pekerjaan dalam satuan jiwa. Jumlah orang yang bekerja dalam penelitian ini menggunakan data yang ada di BPS dalam kurun waktu sepuluh tahun (Lainutu, 2013).

6. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penanaman modal dalam negeri di Indonesia dalam satuan miliar rupiah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi PMDN yang terjadi dalam waktu sepuluh tahun (Nuryadin, 2015).

7. Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing merupakan bentuk investasi dengan membangun atau membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penelitian ini menggunakan data PMA yang terjadi selama sepuluh tahun di Indonesia. Penanaman Modal Asing menggunakan satuan juta US\$ (Poerwono, 2014).

8. Penerimaan PPh Pasal 21

Penerimaan PPh Pasal 21 adalah realisasi penerimaan PPh Pasal 21 yang diukur dalam satuan miliar rupiah. Perhitungan pajak PPh pasal 21 dapat dilakukan dengan memperhatikan tarif PPh 21

dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Tarif PPh 21 berikut ini berlaku pada Wajib Pajak (WP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

- a. WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50 juta adalah 5%
- b. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50 juta - Rp 250 juta adalah 15%
- c. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250 juta - Rp 500 juta adalah 25%
- d. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500 juta adalah 30%
- e. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif pph 21 sebesar 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

G. Uji Hipotesis dan Analisis Data

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi linear berganda, karena penelitian ini dirancang untuk meneliti pengaruh variabel independen terhadap variable dependen. Metode yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Dengan alat analisis yaitu SPSS 22.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia digambarkan dengan fungsi sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 21} = f(\text{PDB, BIR, INF, DELTAJWP, JBEKERJA, PMDN,PMA})\dots\dots\dots(1)$$

Secara spesifikasi, model persamaan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Log PPh Pasal 21} = \alpha + \beta_1 \text{ LogPDB} + \beta_2 \text{ LogBIR} + \beta_3 \text{ LogINF} + \beta_4 \text{ Log DELTAJWP} + \beta_5 \text{ Log JBEKERJA} + \beta_6 \text{ LogPMDN} + \beta_7 \text{ LogPMA} + \mu \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- PPh Pasal 21 : Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21
- α : intercept
- PDB : PDB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)
- BIR : Suku Bunga Bank Indonesia (%)
- INF : Inflasi (%)
- DELTAJWP : Pertambahan Jumlah Wajib Pajak (WP)
- JBEKERJA : Jumlah Orang Bekerja (jiwa)
- PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
- PMA : Penanaman Modal Asing (Juta US\$)
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7$: koefisien regresi
- μ : error term

2. Test of Goodness of Fit (Uji Kesesuaian)

2.1. Koefisien Determinasi (R-square)

Koefisien determinasi (*R-square*) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependen. Nilai *R-square* antara nol dan satu. Nilai *R square* yang kecil berarti kemampuan variable independen dalam menjelaskan variable dependen amat terbatas.

Sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variable independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen (Ghozali, 2011).

2.2. Uji F- Statistik

Uji statistik F untuk menunjukkan apakah semua variable independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variable dependen.

Pengujian hipotesis ini sering disebut sebagai pengujian signifikansi keseluruhan (*overall significance*) terhadap garis regresi yang ingin menguji apakah Y secara linear berhubungan dengan variable independen (Ghozali, 2011). Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} .

2.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable independen terhadap variable dependen dengan menganggap variable independen lainnya konstan. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} .

F. Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk menguji data yang kita olah telah memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji autokorelasi dan uji linearitas. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang urutan uji mana dulu yang harus dipenuhi. Analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada. Sebagai contoh, dilakukan analisis terhadap semua uji asumsi klasik, lalu dilihat mana yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian dilakukan perbaikan pada uji tersebut, dan setelah memenuhi persyaratan, dilakukan pengujian pada uji yang lain. Uji asumsi klasik terdiri dari:

1.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Lebih lanjut Priyatno (2014) mengatakan bahwa normalitas data merupakan hal yang penting karena dengan data yang terdistribusi normal, maka data tersebut dianggap dapat mewakili populasi.

Metode uji normalitas yang digunakan adalah uji *One Sample Kolmogorow Smirnov* (1 Sample-KS), dan untuk mengetahui apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak, maka nilai signifikansi P-value pada Combined K-S lebih besar dari $\alpha = 0.05$.

1.2. Multikolinearitas

Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) Ghozali (2006). Pengujian multikolinearitas pada penelitian ini dilakukan dengan uji *collinierity statistic*.

Menurut Ghozali (2006) dalam melakukan uji multikolinearitas harus terlebih dahulu diketahui *Variance Inflation Factor* (VIF). Pedoman untuk mengambil suatu keputusan adalah sebagai berikut :

- a. Jika *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10 , maka terdapat persoalan multikolinieritas diantara variabel bebas.
- b. Jika *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 , maka tidak terdapat persoalan multikolinieritas diantara variabel bebas.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.

1.3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu seperti dalam data time series. Sehingga terdapat saling

ketergantungan antara faktor pengganggu yang berhubungan dengan observasi yang dipengaruhi oleh unsur gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lainnya. Oleh karena itu, masalah autokorelasi biasanya muncul dalam data time series, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi dalam data *cross sectional*. Uji untuk melihat autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson Test.

1.4 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk menampilkan informasi-informasi yang terkandung dalam data tersebut. Informasi yang dapat ditampilkan dengan melakukan uji statistik deskriptif ini adalah gambaran data mengenai nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum yang dilakukan pada variabel PPh Pasal 21, PDB, Suku Bunga BI, Inflasi, Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Orang Bekerja, PMDN, dan PMA.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini, obyek yang digunakan adalah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Indonesia selama tahun 2009-2018. Berdasarkan metode Interpolasi Linier diperoleh 40 sampel dari penerimaan PPh Pasal 21 dengan periode pengamatan selama 10 tahun.

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear Ordinary Least Square (OLS) terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Uji Asumsi Klasik yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah distribusi data pada tiap-tiap variabel memiliki distribusi normal atau tidak. Pada uji ini dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov Test* dengan tingkat signifikansi 5% dan membandingkan *Asymptotic Significance* dengan nilai α . Jika nilai *Asymptotic Significance* $> \alpha$ 0,05, maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal.

Berikut akan disajikan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Predicted value
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	4,1387144
	Std. Deviation	,18506597
Most Extreme Differences	Absolute	,104
	Positive	,081
	Negative	-,104
Kolmogorov-Smirnov Z		,510
Asymp. Sig. (2-tailed)		,957

Sumber : Hasil output SPSS, 2018

Dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov dalam Tabel 4.1. diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikan KS-Z adalah sebesar 0.957 dan nilai sig ini lebih besar dari 0.05 ($0.957 > 0.05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel eksogenus. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki korelasi, dengan multikolinieritas ini dapat dilihat melalui nilai *tolerance value* dan *variance inflation factor*

(VIF). Apabila nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka model regresi tersebut merupakan model yang baik. Hasil pengujian multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PDB	,913	6,515
BIR	,102	6,806
INF	,171	5,835
JWP	,187	5,354
JBEKERJA	,117	7,426
PMDN	,183	2,051
PMA	,124	2,099

Sumber : Data diolah, 2018

Dari Tabel diatas terlihat bahwa variabel PDB, Suku Bunga BI, Inflasi, Pertambahan Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Orang Bekerja, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing mempunyai angka angka *Variance Inflation Factor* (VIF) dibawah angka 10 dan nilai tolerance diatas 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa indikator dari ketujuh variabel tersebut dalam penelitian ini tidak saling berkorelasi.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini dengan kesalahan pengganggu sebelumnya. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson.

Tabel 4.3. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,998 ^a	,995	,994	,01402	,315

a. Predictors: (Constant), PMA, INF, DELTAJWP, BIR, PMDN, PDB, JBEKERJA

b. Dependent Variable: PPH

Sumber :Data olahan, 2018

Dari hasil uji autokorelasi diatas, nilai Durbin Watson sebesar 0,315. Sedangkan dilihat dari DW untuk 7 variabel eksogenous (k) = 7 dan banyak data adalah $n=40$, untuk level signifikan 0.05, maka diperoleh DU sebesar 1.9243 sehingga $0 \leq D \leq DL = 0 \leq 0,315 \leq 1,9243$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif.

d. Statistik Deskriptif

Data statistik deskriptif menampilkan informasi-informasi yang terkandung dalam data tersebut. Informasi yang dapat ditampilkan dengan melakukan uji statistik deskriptif ini adalah gambaran data mengenai nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum yang dilakukan pada variabel PPh Pasal 21, PDB, Suku Bunga BI, Inflasi, Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Orang Bekerja, PMDN, dan PMA. Hasil perhitungan statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.5
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Produk Domestik Bruto	40	4,9944	5,9757	5,7519	,18514
Suku Bunga BI	40	0.7134	0.9164	0,8826	,07238
Inflasi	40	0.4116	0.9350	0,8187	,09687
Jumlah Wajib Pajak	40	5.4459	6.2369	5,7148	,23096
Jumlah Orang Bekerja	40	7.4510	7.6974	7,5791	,37194
PMDN	40	3.8923	4.9380	4,1122	,02748
PMA	40	3.4337	4.0493	3,5713	,30758
PPh Pasal 21	40	3,8143	4,4229	4,1387	,22480

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil pengolahan statisik deskriptif diatas, diketahui bahwa:

a. Produk Domestik Bruto

Variabel Produk Domestik Bruto (X1) memiliki nilai

minimum sebesar 4,9944 yang terjadi pada tahun 2017, sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 5,9757 yang terjadi pada tahun 2015. Nilai rata-rata (Mean) variabel ini adalah 5,7519, sedangkan nilai standar deviasinya adalah 0,18514.

b. Suku Bunga BI

Variabel Suku Bunga BI (X2) memiliki nilai minimum sebesar 0,7134 yang terjadi pada tahun 2011, sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 0,9164 yang terjadi pada tahun 2009. Nilai rata-rata (Mean) variabel ini adalah 0,8826, sedangkan nilai standar deviasinya adalah 0,0723.

c. Inflasi

Variabel inflasi (X3) memiliki nilai minimum sebesar 0,4116 yang terjadi pada tahun 2012, sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 0,9350 yang terjadi pada tahun 2013. Nilai rata-rata (Mean) variabel ini adalah 0,8187, sedangkan nilai standar deviasinya adalah 0,0968.

d. Jumlah Wajib Pajak

Variabel Jumlah Wajib Pajak (X4) memiliki nilai minimum sebesar 5,4459 yang terjadi pada tahun 2016, sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 6,236 yang terjadi pada tahun 2010. Nilai rata-rata (Mean) variabel ini adalah 5,7148, sedangkan nilai standar deviasinya adalah 0,2309.

e. Jumlah Orang Bekerja

Variabel Jumlah Orang Bekerja (X5) memiliki nilai minimum sebesar 7,451 yang terjadi pada tahun 2009, sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 7,697 yang terjadi pada tahun 2018. Nilai rata-rata (Mean) variabel ini adalah 7,5991, sedangkan nilai standar deviasinya adalah 0,3719.

f. Penanaman Modal Dalam Negeri

Variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (X6) memiliki nilai minimum sebesar 3,8923 yang terjadi pada tahun 2009, sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 4,9380 yang terjadi pada tahun 2018. Nilai rata-rata (Mean) variabel ini adalah 4,1122, sedangkan nilai standar deviasinya adalah 0,0274.

g. Penanaman Modal Asing

Variabel Penanaman Modal Asing (X7) memiliki nilai minimum sebesar 3,433 yang terjadi pada tahun 2009, sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 4,0493 yang terjadi pada tahun 2017. Nilai rata-rata (Mean) variabel ini adalah 3,5713, sedangkan nilai standar deviasinya adalah 0,30758.

h. Penerimaan PPh Pasal 21

Variabel penerimaan PPh Pasal 21 (Y) memiliki nilai minimum sebesar 3,8143 yang terjadi pada tahun 2015, sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 4,4429 yang terjadi pada tahun 2017.

Nilai rata-rata (Mean) variabel ini adalah 4,1387, sedangkan nilai standar deviasinya adalah 0,22480.

B. Hasil Penelitian dan Analisis data

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variable independen Produk Domestik Bruto, Suku Bunga BI, Inflasi, pertambahan jumlah wajib pajak, jumlah orang bekerja, PMDN, dan PMA terhadap variable dependen penerimaan PPh Pasal 21. Tabel 4.2 menampilkan hasil dari persamaan regresi pada penelitian ini yang diolah menggunakan program SPSS 22 yaitu :

Tabel 4.6
Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-11,882	3,641		-3,263	,003
	LOG_PDB	2,343	-,271	,916	8,632	,000
	LOG_BIR	-,168	,073	,087	-2,291	,029
	LOG_INF	-,038	,023	-,048	-1,635	,012
	LOG_JWP	,006	,014	,013	,460	,048
	LOG_JBEKERJA	,276	,619	,041	,445	,039
	LOG_PMDN	,134	,025	-,222	5,278	,000
	LOG_PMA	,245	,065	,298	3,782	,001

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan dari hasil tabel di atas, maka persamaan regresi dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut :

$$\begin{aligned} LPenerimaan\ PPh\ Pasal\ 21 = & -11,882 + 2,343LPDB - 0,168LBIR - \\ & 0,038LINF + 0,006LDELTAJWP + \\ & 0,276LJBEKERJA + 0,134LPMDN + \\ & 0,245LPMA \end{aligned}$$

Dari hasil persamaan regresi di atas, dapat diketahui bahwa :

- 1) Nilai a atau konstanta sebesar negatif -11,882 maksudnya apabila nilai Produk Domestik Bruto (PDB), Suku Bunga BI (BIR), inflasi (INF), Jumlah Wajib Pajak (JWP), Jumlah Orang Bekerja (JBEKERJA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Penanaman Modal Asing (PMA) sama dengan nol, maka skor penerimaan PPh Pasal 21 senilai -11,882.
- 2) Koefisien regresi Produk Domestik Bruto bernilai positif yaitu sebesar 0,916 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu poin ukuran perusahaan maka akan mengurangi penerimaan PPh Pasal 21 sebesar 0,916.
- 3) Koefisien regresi Suku Bunga BI bernilai positif yaitu sebesar 0,087 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu poin ukuran perusahaan maka akan mengurangi penerimaan PPh Pasal 21 sebesar 0,087.
- 4) Koefisien regresi Inflasi bernilai negatif yaitu sebesar -,048 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu poin ukuran

perusahaan maka akan mengurangi penerimaan PPh Pasal 21 sebesar -,048.

- 5) Koefisien regresi Jumlah Wajib Pajak bernilai positif yaitu sebesar 0,013 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu poin ukuran perusahaan maka akan mengurangi penerimaan PPh Pasal 21 sebesar 0,013.
- 6) Koefisien regresi Jumlah Orang Bekerja bernilai positif yaitu sebesar 0,041 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu poin ukuran perusahaan maka akan mengurangi penerimaan PPh Pasal 21 sebesar 0,041.
- 7) Koefisien regresi Penanaman Modal Dalam Negeri bernilai negatif yaitu sebesar -0,222 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu poin ukuran perusahaan maka akan mengurangi penerimaan PPh Pasal 21 sebesar -0,222.
- 8) Koefisien regresi Penanaman Modal Asing bernilai positif yaitu sebesar 0,298 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu poin ukuran perusahaan maka akan mengurangi penerimaan PPh Pasal 21 sebesar 0,298.

2. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinan pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan dari variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat dalam penelitian. Dalam

penelitian ini digunakan ketentuan nilai *Adjusted R Square* yaitu, melihat nilai koefisien. Jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, sebaliknya jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan dalam memprediksi variabel dependen. Tabel 4.11 menampilkan hasil dari uji koefisien determinan pada penelitian ini yaitu :

Tabel 4.7
Uji Koefisien Determinan
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,998 ^a	,996	,994	,01402

Sumber : Data diolah, 2018

Dari tabel di atas diketahui hasil nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,994. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel *penerimaan PPh Pasal 21* dapat dijelaskan oleh variabel-variabel Produk Domestik Bruto, Suku Bunga BI, Inflasi, penambahan jumlah wajib pajak, jumlah orang bekerja, PMDN, dan PMA sebesar 99,4%, sisanya sebesar 0,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

3. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan antara Produk Domestik Bruto, Suku Bunga BI, Inflasi, penambahan jumlah wajib pajak, jumlah orang bekerja, PMDN, dan PMA terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Uji ini dapat dilihat dari besarnya nilai F hitung dengan F tabel. Hasil lain yang dapat dilihat adalah besarnya nilai signifikansi (sig.) terhadap alpha (α). Apabila nilai F hitung $>$ F tabel atau sig. $<$ 0,05, maka model regresi adalah model yang layak digunakan dalam penelitian ini. Tabel 4.8 menampilkan hasil dari uji F pada penelitian ini :

Tabel 4.8
Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1,330	7	,190	966,683	,000 ^a
Residual	,006	32	,000		
Total	1,337	39			

Sumber ; Data diolah, 2018

Dari tabel di atas diketahui hasil dari F hitung adalah 966,683, selanjutnya mencari hasil dari F tabel dengan cara menentukan k (jumlah variabel independen) = 7 dan n (jumlah sampel) = 280, maka kita masukkan ke dalam rumus (k ; n - k) adalah (7 ; 280 - 7) = (7 ; 280). Dari hasil tersebut dapat kita

masukkan untuk menemukan hasil F tabel yaitu sebesar 2,06. Berarti $F_{hitung} 966,683 > F_{tabel} 2,06$. Serta $sig\ 0,00 < \text{dari } 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi adalah model yang layak digunakan.

4. Uji Hipotesis

Uji T pada penelitian ini berfungsi untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen dalam penelitian yaitu antara Produk Domestik Bruto, Suku Bunga BI, Inflasi, pertambahan jumlah wajib pajak, jumlah orang bekerja, PMDN, dan PMA terhadap variabel dependen penerimaan PPh Pasal 21. Dalam uji T digunakan alpha (α) sebesar 0,05. Hasil dari uji T dapat dilihat dari besarnya nilai t hitung dengan t tabel. Hasil lain yang dapat dilihat adalah dari besarnya nilai signifikansi (sig) terhadap alpha (α). Kriteria penerimaan adalah apabila nilai t hitung $> t$ tabel dan nilai signifikansi (sig.) $< \alpha$ maka hipotesis diterima, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Tabel 4.9 menampilkan hasil dari uji T pada penelitian ini :

Tabel 4.9
Uji Signifikansi (Uji T)
Coefficients^a

Model	T	Sig.
1 (Constant)	-3,263	,003
LOG_PDB	8,632	,000
LOG_BIR	-2,291	,029
LOG_INF	-1,635	,012
LOG_JWP	0,460	,048
LOG_JBEKERJA	0,445	,039
LOG_PMDN	5,278	,000
LOG_PMA	3,378	,001

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa :

a. Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah Produk Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Berdasarkan tabel 4.7, variabel Produk Domestik Bruto memiliki nilai T hitung positif 8,632 dan nilai sig. (0,00) < α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima, yang berarti Produk Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

b. Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah Suku Bunga BI berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Berdasarkan table 4.7, variable Suku Bunga BI memiliki nilai T negatif -2,291 dan nilai sig. (0,029) < α (0,05), maka dapat

disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima, yang berarti Suku Bunga BI berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

c. Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah Inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Berdasarkan table 4.7, variable inflasi memiliki nilai T negatif -1,635 nilai sig. (0,029) < α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima, yang berarti inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

d. Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat pada penelitian ini adalah jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Berdasarkan table 4.7, variable jumlah wajib pajak memiliki nilai T positif 2,460 dan nilai sig. (0,048) < α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat diterima, yang berarti jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

e. Hipotesis Kelima

Hipotesis kelima pada penelitian ini adalah jumlah orang bekerja berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Berdasarkan table 4.7, variable jumlah orang bekerja memiliki nilai T positif 2,445 dan nilai sig. (0,035) < α (0,05), maka

dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima diterima, yang berarti jumlah Orang Bekerja berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

f. Hipotesis Keenam

Hipotesis keenampada penelitian ini adalah Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Berdasarkan table 4.7, variable penanaman modal dalam negeri memiliki nilai T positif 5,278 dan nilai sig. $(0,00) < \alpha (0,05)$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam diterima, yang berarti Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

g. Hipotesis Ketujuh

Hipotesis ketujuh pada penelitian ini adalah Penanaman Modal Asing berpengaruh positif pada penerimaan PPh Pasal 21. Berdasarkan table 4.7, variable penanaman modal asing memiliki nilai T positif 3,378 dan nilai sig. $(0,01) < \alpha (0,05)$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketujuh diterima, yang berarti Penanaman Modal Asing berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

Tabel 4.10
Ringkasan Hasil pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Sig.	Hasil
H1	Produk Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21	0,000	Diterima
H2	Suku Bunga BI berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21	0,029	Diterima
H3	Inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21	0,012	Diterima
H4	Jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21	0,048	Diterima
H5	Jumlah orang bekerja berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21	0,035	Diterima
H6	Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21	0,000	Diterima
H7	Penanaman Modal Asing berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21	0,001	Diterima

D. Pembahasan

a. Pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap penerimaan PPh Pasal 21

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima. Hasil menunjukkan Produk Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Muh Ihsan (2016), Wijayanti (2015) dan Tugino (2014) yang menyatakan bahwa PDB berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

Berpengaruhnya PDB terhadap penerimaan PPh Pasal 21 karena pertumbuhan PDB diikuti oleh kenaikan penerimaan pajak. Hal ini dapat terjadi karena semakin tingginya PDB maka semakin tinggi pula perekonomian Indonesia. Diikuti dengan semakin tinggi tingkat pendapatan maka akan meningkatkan pajak langsung seperti pajak penghasilan. Dampak selanjutnya adalah penerimaan pajak juga dapat semakin tinggi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2013) yang menyatakan bahwa PDB tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Walaupun perekonomian Negara meningkat tetapi hal tersebut dapat tidak dibarengi dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Semakin tinggi tingkat perekonomian Negara maka akan semakin banyak biaya atau perbelanjaan yang perlu dikeluarkan

b. Pengaruh Suku Bunga BI terhadap penerimaan PPh Pasal 21

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima. Hasil menunjukkan bahwa Suku Bunga BI berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Tugino (2014) dan Ferdiawan (2015) yang menyatakan bahwa Suku Bunga BI berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Sumidartini (2017) dan Laksmono (2014) yang menyatakan bahwa Suku Bunga BI berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Tidak berpengaruhnya Suku Bunga BI terhadap penerimaan PPh Pasal 21 diduga yaitu ketika Suku Bunga BI naik maka suku bunga hanya akan mempengaruhi sektor perbankan saja tanpa mempengaruhi tingkat penerimaan pajak atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

c. Pengaruh Inflasi terhadap penerimaan PPh Pasal 21

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima. Hasil menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Rahmat dan Herawati (2014) dan Tugino (2014) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Rahmany (2014), Tanzi dan Nalendra (2014) serta Ferdiawan (2015) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

Tidak berpengaruhnya inflasi terhadap penerimaan PPh Pasal 21 diduga karena Laju inflasi berpengaruh positif pada belanja negara jangka pendek dipengaruhi oleh masih tingginya belanja untuk pegawai, sedangkan belanja pegawai sebagai hasil imbal jasa pegawai yang biasanya digunakan untuk konsumsi bukan modal

kerja. Konsumsi yang meningkat akan berdampak langsung pada kenaikan inflasi. Sehingga terjadi kenaikan tingkat harga karena pendapatan yang tinggi hal ini sesuai dengan teori *demand pull inflation*. Ketika laju inflasi naik akan berdampak pada naiknya harga-harga barang dipasaran. Kenaikan harga-harga secara umum tanpa disertai dengan kenaikan gaji atau upah masyarakat maka akan mengakibatkan semakin kecilnya daya beli masyarakat. Gaji yang diterima akan terasa semakin kecil dan kurang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penerima PPh Pasal 21.

d. Pengaruh jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan PPh Pasal 21

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis keempat (H_4) diterima. Hasil menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Putra (2018), Pramono (2015) serta Amina Lainutu (2017) yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

Berpengaruhnya jumlah wajib pajak terhadap penerimaan PPh Pasal 21 diduga jika untuk menetapkan orang pribadi menjadi Wajib Pajak, maka pemerintah membuat undang-undang yang mendasarinya. Setelah orang pribadi menjadi Wajib Pajak, maka orang pribadi tersebut akan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Orang pribadi yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Wajib

Pajak tetapi tidak mendaftarkan diri, pemerintah akan mengenakan NPWP secara jabatan, yang merupakan program dari ekstensifikasi pajak, semakin banyak wajib pajak yang terdaftar dan membayarkan pajak sesuai ketentuan maka akan menaikkan tingkat penerimaan pajak namun harus disertai dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

e. Pengaruh jumlah Orang Bekerja dengan penerimaan PPh Pasal 21

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis kelima (H_5) diterima. Hasil menunjukkan jumlah orang bekerja berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Prasetyo Bangun (2015), Putra (2018) serta Alfian Nurrohman (2010) yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

Berpengaruhnya jumlah orang bekerja terhadap penerimaan PPh Pasal 21 diduga karena semakin banyak tingkat jumlah orang bekerja maka tingkat pendapatan yang didapat juga akan semakin tinggi dan menyebabkan tingkat penerimaan pajak akan ikut naik. Tingkat penerimaan pajak penghasilan akan mengalami kenaikan apabila orang yang bekerja telah mendapatkan potongan atas pajaknya langsung kepada gaji atau upah yang didapatkan.

f. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap penerimaan PPh Pasal 21

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis keenam (H_6) diterima. Hasil menunjukkan bahwa penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh Bambang Muqsithu (2014), Jamzani Sodik (2015) serta Didi Nuryadin (2015) yang menyatakan bahwa penanaman modal dalam negeri berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

Berpengaruhnya penanaman modal dalam negeri terhadap penerimaan PPh Pasal 21 diduga karena salah satu sumber penghasilan perusahaan dan sumber pendapatan masyarakat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Penghasilan dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan PMDN karena PMDN dapat menggerakkan sumber daya ekonomi untuk menambah pendapatan. Naiknya pendapatan ini akan menaikkan pendapatan masyarakat ataupun penghasilan yang akan dikenakan pajak, sebagai dasar pengenaan pajak dan akibatnya PPh Pasal 21 juga akan semakin besar.

g. Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap penerimaan PPh Pasal 21

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis keenam (H_7) diterima. Hasil menunjukkan bahwa penanaman modal

asing berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh Bambang Muqsithu (2014) serta Dwisetya Puerwono (2014) yang menyatakan bahwa penanaman modal asing berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

Berpengaruhnya penanaman modal asing terhadap penerimaan PPh Pasal 21 diduga dengan meningkatnya jumlah Penanaman Modal Asing di Indonesia maka akan meningkatkan jumlah lapangan kerja, dengan begitu akan menambah jumlah orang yang bekerja. Dengan meningkat jumlah orang yang bekerja maka akan meningkatkan PPh Pasal 21 di Indonesia.